MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (ORIENTASI BARU PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DI ERA OTONOMI DAERAH)

Dr. Asep Priatna, M.Pd
STKIP Subang
priatna.asep@yahoo.com

ABSTRACT

One of the things implied by the education decentralization policy is to run independent school education management in different perspectives according to the conditions of each region. Decentralization is no longer seen as a concept but should be implemented at all levels of management, not least on the institutional arrangements, systems and educational units, both in the formal and non-formal education channels. New patterns of management education in the form of School Based Management, is actually giving ample space for the community that any decision made by the local government is more "grounded" and provide quality education to the younger generation. In this context, education decentralization implies an effort to bring the community to the decision making on local needs, so that the development of education in accordance with the peculiarities of the region, on the other hand the potential can be utilized. In the end, the real implementation of the School Based Management is on the order of the institution is expected to improve the quality of basic education and excellence in the area of human resources.

Keywords: school-based management, decentralization of education, basic education

ABSTRAK

Salah satu hal yang tersirat dari kebijakan desentralisasi pendidikan adalah kemandirian sekolah untuk menjalankan manajemen pendidikan dalam berbagai perspektif sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Desentralisasi tidak lagi dipandang sebagai suatu konsep tetapi harusnya diimplementasikan pada semua tingkat manajemen, tidak terkecuali pada tatanan kelembagaan, sistem maupun satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal. Pola baru manajemen pendidikan berupa Manajemen Berbasis Sekolah, sejatinya memberi ruang yang cukup luas bagi masyarakat agar setiap keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah lebih bersifat "membumi" dan memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas kepada generasi muda. Dalam konteks tersebut, desentralisasi pendidikan mengandung pengertian sebagai upaya mendekatkan masyarakat terhadap pengambilan keputusan pada kebutuhan daerah, sehingga pembangunan pendidikan lebih sesuai dengan kekhasan daerah, di sisi lain potensi masyarakat dapat lebih didayagunakan. Pada akhirnya, implementasi secara nyata Manajemen Berbasis Sekolah ini pada tatanan lembaga pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dasar dan keunggulan sumber daya manusia di daerah.

Kata kunci : manajemen berbasis sekolah, desentralisasi pendidikan, pendidikan dasar

PENDAHULUAN

Desentralisasi dan otonomi pendidikan berjalan seiring dengan reformasi pemerintahan berupa otonomi daerah berdasar Undang-Undang No. 29 tahun 1999 yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa "kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembayaran, sarana dan prasarana serta SDM sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut".

Otonomi Daerah mengandung pengertian hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku (UU No.32 tahun 2004). Konsekuensinya, sarana, prasarana dan SDM sesuai dengan kewenangan diserahkan ke daerah.

Jika dirunut manajemen pendidikan di Indonesia pada beberapa tahun ke belakang masih bersifat sentralistik. Suasana kompetisi dan persaingan antar daerah di masa lalu hampir tidak dikenal karena semua kebijakan fiskal, administratif dan politis diatur dari pusat. Hampir tidak ada ruang bagi eksekutif di daerah untuk menentukan kebijakan sendiri. Bupati atau walikota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah akan dapat ditolak oleh otoritas pusat jika tidak sesuai dengan kepentingan politik elite penguasa di Jakarta. Jadi, eksekutif dan legislatif daerah pada masa itu hanya jari-jari kekuasaan pusat yang berada di daerah. Harapan normatif yang dilekatkan kepada DPRD sebagai wakil rakyat kandas dilumat sistim yang memang dirancang untuk melestarikan status quo autoritarian di bawah rezim Orde Baru, anggota dan badan legislatif dikooptasi.

Perjuangan reformasi yang kemudian berhasil menumbangkan rezim Orde Baru tahun 1997 sangat membuka peluang untuk merombak tata pemerintahan yang sentralisitik. Satu di antara pilar reformasi adalah penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Bukan hanya perubahan politik, social ekonomi, hukum dan budaya, akan tetapi harapan itu juga meliputi berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya pendidikan.

Namun, meski pemerintah pusat telah menjalankan desentralisasi sebagai konsekuensi reformasi politik, akan tetapi desentralisasi dan otonomi daerah lebih dilihat sebagai hadiah (kemurahan hati) pusat membagi kekuasaan kepada daerah. Dapat terlihat pada saat ini meskipun sudah dilaksanakan otonomi daerah dan otonomi sekolah, kenyataannya sistem pendidikan kita masih cenderung sentralistik. Semisal (Standar kelulusan dan penentuan kelulusan siswa ditentukan oleh pusat (melalui BSNP). Otonomi daerah juga belum memberikan kepedulian daerah secara penuh, terutama berkaitan dengan penyediaan anggaran pendidikan dalam APBD. Akibatnya mutu pendidikan di Indonesia sangat ketinggalan dibandingkan dengan Negara-negara lain, termasuk negara yang merdeka sesudah kemerdekaan Indonesia, seperti Malaysia, Singapore, bahkan oleh Philipina dan Vietnam.

Permasalahan manajemen ini membuat problematika pendidikan di daerah kembali menjadi sangat

kompleks. Bukan hanya berhubungan dengan masalah kebijakan pemerintah pusat dan daerah, manajemen kelembagaan, kepemimpinan kepala sekolah, tetapi juga masalah kurangnya fasilitas pembelajaran, mutu, serta profesionalisme guru dan partisipasi masyarakat yang belum maksmimal.

Sudah saatnya pemerintah daerah beserta seluruh *stakeholder* terkait lebih proaktif dalam mengatasi kompleksitas problematika pendidikan ini, karena di era otonomi daerah seperti sekarang ini pemecahan masalah di tingkat lokal sangat tergantung pada seberapa jauh usaha pemerintah daerah bersama masyarakatnya dalam mengantisipasi masalah-masalah pendidikan di daerahnya masing-masing.

LANDASAN TEORI

PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Pemerintah telah menerapkan kebijakan otonomi pendidikan, sebagaimana mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 dalam Pasal 34 ayat (3) yakni “Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat”. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (1) juga disebutkan “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah / madrasah”.

Berdasarkan pasal-pasal di atas maka penyelenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah dan setiap satuan pendidikan itu sendiri. Kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Hanya dengan kemandirian, pendidikan dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas dan mobilitasnya (Rivai, 2010: 32). Artinya pemerintah menilai bahwa selama ini terhambatnya kemajuan pendidikan Indonesia diantaranya karena pengelolaan pendidikan yang sentralistis sehingga perlunya kebijakan desentralisasi, dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia.

Tujuan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Tahun 2010-2015 adalah terwujudnya sistem pendidikan nasional di daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. Pencapaian Visi dan Misi ditetapkannya tujuan pembangunan pendidikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dalam rangka daya saing sumberdaya manusia menghadapi tantangan global melalui penguasaan iptek.
2. Meningkatkan pemerataan dan memperluas akses layanan pendidikan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.
4. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur penyelenggaraan pendidikan.
5. Meningkatkan koordinasi dan kinerja aparatur penyelenggara pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Daerah serta stakeholders pendidikan.

6. Meningkatkan kerjasama dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan daerah, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri.

Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu : 1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki; 2) Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; 3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat; 4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

Namun, dalam pelaksanaannya banyak para pengamat berpendapat bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah yang dirasakan terlalu cepat itu, dianggap sebagai proyek yang sangat ambisius. Bahkan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyatakan bahwa pada awal dicanangkannya Otoda, hanya 6 dari 30 provinsi yang benar-benar siap sepenuhnya untuk melaksanakan Otoda tersebut. Menurut dugaan mereka yang belum siap itu adalah daerah-daerah yang kurang memiliki kesiapan administrasi, kurang memiliki sumber daya manusia local, mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan dan juga ketidakharmonisan para elit politik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota (Said, 2005: 2).

Namun demikian, dari cerita yang tergambar di atas bukan berarti pelaksanaan Otoda dianggap gagal total. Terdapat banyak daerah yang setelah Otoda diberlakukan justru mengalami kemajuan pesat. Seperti Kabupaten Jembrana, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Luwu, Kota Tarakan, Kota Bontang, Pare-Pare, Kota Denpasar, dan lain sebagainya. Perbedaan pelaksanaan Otoda pada umumnya sangat tergantung kondisi lingkungan daerah, baik fisik maupun non-fisik. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai, antusiasme para birokrat daerah dan partisipasi masyarakat dalam bentuk dukungan dan pengawasan.

PERMASALAHAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan, harus diakui bahwa sampai saat ini masih ada daerah-daerah tertentu yang belum siap menerima kewenangan dari pemerintah pusat, khususnya dalam bidang pendidikan. Ada berbagai kemungkinan yang menyebabkan daerah tertentu belum siap menerima desentralisasi pendidikan ini.

1. Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai. Maksud SDM

yang kurang yaitu berhubungan dengan kuantitas dan kaualitas. Masih terdapat di daerah tertentu kualitas SDM nya belum dapat memahami, menganalisis, serta mengaplikasikan konsep desntralisasi pendidikan ini dengan baik. Demikian pula halnya yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah SDM yang ada.

2. Sarana dan prasarana belum tersedia secara cukup dan memadai. Hal ini berhubungan erat dengan ketersediaan dana yang ada di setiap derah. Selama ini, daerah-daerah tertentu asyik dengan sistem *dropping* yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Mereka sangat terkejut ketika tiba-tiba memperoleh kewenangan untuk mengelola secara mandiri sebagian besar urusan pendidikan di daerahnya. Untuk itu, mereka belum siap dengan segala bentuk sarana dan prasarana yang diperlukan.
3. Anggaran pendapatan asli daerah (PAD) mereka masih rendah. Beberapa daerah yang selama ini kita kenal dengan daerah tertinggal, merasa keberatan untuk langsung menerima beban kewenangan kebijakan desentralisasi pendidikan ini. Pembiayaan pembangunan yang mereka lakukan selama ini banyak ditunjang oleh pusat atau provinsi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka tergolong masih rendah. Oleh karena itu, jika memungkinkan, mereka masih berharap dapat diberi kesempatan untuk menunda pengimplementasian kebijakan tersebut di daerah mereka.
4. Secara psikologis, mental mereka belum siap menghadapi sebuah perubahan. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Namun, tidak semua orang memiliki pandangan dan sikap yang sama terhadap sebuah perubahan. Ketakutan akan masa depan yang diakibatkan oleh perubahan yang terjadi, membuat mereka tidak siap secara mental menghadapi perubahan tersebut.
5. Mereka juga gamang atau takut terhadap upaya pembaruan. Salah satu bentuk perubahan yang sering dipakai yaitu upaya pembaruan. Pembaruan dalam bidang pendidikan saat ini kita kenal dengan sebutan pembaruan kurikulum. Setiap kali terjadi pembaruan kurikulum, para guru kembali disibukkan dengan berbagai kegiatan, seperti penataran, uji coba model, uji coba mekanisme, sosialisasi kurikulum dan sebagainya.

Sementara itu pelaksanaan desentralisasi pendidikan atau disebut Otonomi Pendidikan masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan karena kekurangsiapan pranata sosial, politik dan ekonomi. Ada 6 faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi pendidikan belum jalan, yaitu : 1) Belum jelas aturan permainan tentang peran dan tata kerja di tingkat kabupaten dan kota. 2) Pengelolaan sektor publik termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk dilaksankana secara otonom karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang tidak memadai. 3) Dana pendidikan dan APBD belum memadai. 4) Kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. 5) Otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati, Walikota sebagai penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi

pendidikan di daerahnya sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama. (6) kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana dan dana yang dimiliki.

Hal ini mengakibatkan akan terjadinya kesenjangan antar daerah. Tidak mengherankan apabila Indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua atau *education for all* (EFA) di Indonesia menurun tiap tahunnya. Tahun 2011 Indonesia berada di peringkat 69 dari 127 negara dan merosot dibandingkan tahun 2010 yang berada pada posisi 65. Indeks yang dikeluarkan pada tahun 2011 oleh UNESCO ini lebih rendah dibandingkan Brunei Darussalam (34), serta terpaut empat peringkat dari Malaysia (65). Tidak bisa dibayangkan jika keadaan yang demikian tidak diatasi dengan segera. Permasalahan akan semakin kompleks dan diperlukan strategi multidimensial dalam memecahkannya. Sehingga pemerintah perlu membuat aturan dalam penentuan standar mutu pendidikan nasional dengan memperhatikan kondisi perkembangan kemandirian masing-masing daerah.

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH SEBAGAI ALTERNATIF PENGUATAN SISTEM DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Untuk mengatasi permasalahan pendidikan di tingkat lokal, diperlukan penguatan pada tingkat manajemen di setiap organisasi pendidikan, terutama di tingkat SD. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian dalam era desentralisasi pendidikan adalah menata ulang manajemen sekolah. Sebagai seorang Kepala Sekolah Dasar bukan hanya harus memiliki charisma, tetapi yang paling penting adalah menguasai *management* modern, sehingga dapat dengan cerdik dan cekatan membaca dan memahami peluang dan tantangan yang dihadapi dan selanjutnya dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasinya.

Dalam era desentralisasi, kekuasaan bersifat disebarkan (Beare and Boyd, 1993) sehingga hakikat desentralisasi pendidikan adalah penyerahan sebagian kewenangan kepada pemerintahan kabupaten dan kota untuk menangani bidang pendidikan sehingga diharapkan pemerintahan di daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih lancer, mudah, cepat, dan berkualitas. Dengan kata lain, sebagai kepala sekolah harus mampu membentuk *team work* yang tangguh dan solid. Dengan demikian, setiap perubahan dalam masyarakat akan diantisipasi oleh organisasi pendidikan tersebut dengan cepat dan tepat.

Syafaruddin (2008: 144) menyatakan bahwa “untuk menciptakan sekolah unggul (bermutu), diperlukan operasional manajemen sekolah yang sesuai dengan prinsip dan karakteristik keunggulan yang diiinginkan. Karena itu, kepala sekolah dituntut untuk memfungsikan manajemen yang mampu mengoptimalkan semua sumber daya sekolah secara otonomi, akuntabel, dan transparan”.

Sementara itu Bafadal (2003: 28) menyatakan “untuk mewujudkan wawasan keunggulan dalam konteks pendidikan, maka diperlukan upaya strategis mewujdkan sekolah unggulan, kelas unggulan, dan pembelajaran unggulan. Sekolah unggulan memerlukan tenaga

profesional dan sumber daya yang memadai. Tegasnya, sekolah unggul (bermutu) akan bermuara pada wujud pembelajaran yang bermutu". Sesungguhnya semua keunggulan yang diharapkan hanya akan terwujud di tangan kepala sekolah yang memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan unggul.

Sebenarnya kualifikasi manajerial yang demikian ini telah diajabarkan dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah merupakan terjemahan dari istilah *School-Based Management* (SBM) yang pertama kali muncul dan populer di Amerika Serikat. Konsep ini ditawarkan ketika masyarakat mempertanyakan relevansi dan korelasi hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Fattah (2004: 8) manajemen berbasis sekolah diartikan sebagai "pengalihan dalam pengambilan keputusan dari tingkat pusat sampai ke tingkat sekolah. Pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dipandang sebagai otonomi di tingkat sekolah dalam pemanfaatan sumber daya (*resources*) sehingga sekolah mampu secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, memanfaatkan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan (*accountability*) kepada setiap yang berkepentingan (*stakeholders*)".

Pada hakekatnya manajemen berbasis sekolah adalah berfokus kepada kekuatan sumber daya sekolah. Mulyasa (2006: 11) menyatakan bahwa "manajemen berbasis sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah".

Jadi, sudah cukup jelas MBS secara konsepstual merupakan pengkoordinasian dan pendayagunaan sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah akan membawa dampak terhadap peningkatan kinerja sekolah dalam hal mutu, efisiensi manajemen, dan efisiensi anggaran pembiayaan pendidikan. Selain itu MBS secara tidak langsung juga akan meningkatkan kualitas pembelajaraan dalam rangka mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional.

Namun demikian, seorang manajer pendidikan juga harus mencari terobosan lain dalam *managerial.* Guna lebih memperkuat organisasi sekolah dan soliditas team, maka diperlukan visi misi sekolah yang jelas, terarah dan terukur. Tanpa visi misi yang menjadi roh dalam menghidupkan organisasi sekolah, maka mustahil target yang sudah ditetapkan akan dapat tercapai.

Semua kegiatan tersebut di atas tidak akan berhasil tanpa dukungan dana yang cukup. Bantuan dari pemerintah pusat dan daerah pasti tidak akan mencukupi, sebab peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran terus berkembang seiring dengan kemajuan dan tuntutan kurikulum. Untuk itu dukungan dari masyarakat juga perlu terus dimotivasi, agar bertambah kuat. Salah satu tujuan manajemen berbasis sekolah adalah agar otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat atau *local stakeholders* mempunyai keterlibatan tinggi. Kekuatan MBS salah satunya memberikan kerangka

dasar bahwa setiap unsur *stakeholders* akan dapat berperan dalam meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan kesempatan pendidikan.

Pada saat ini perlu diaktualisasikan pendidikan dengan paradigma baru yang dapat mewujudkan keterlibatan dan peran akfif masyarakat. Menurut Tilaar (2004: 22) ada beberapa prinsip dasar paradigma baru pendidikan nasional untuk memberdayakan sekolah, yaitu:

1. Partsipasi masyarakat di dalam mengelola pendidikan (*community based education).*
2. Demokrasi proses pendidikan
3. Sumber daya pendidikan yang professional
4. Sumber daya penunjang yang memadai

Salah satu upaya yang sedang digalakkan adalah peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Sekolah diberikan otonomi yang semakin luas dalam memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya di dalam dan dari luar sekolah. Desentralisasi memungkinkan keterlibatan masyarakat di daerah secara lebih besar dalam menentukan tujuan dan kebijakan sekolah mengenai pengajaran dan pembelajaran peserta didik.

Menurut Imron (2008: 80) masyarakat dipandang sebagai modal dasar pembangunan. Keterlibatan mereka dalam kebijakan-kebijakan negara termasuk kebijakan pendidikan, adalah manifestasi dari pemanfaatan dan pendayagunaan modal dasar pembangunan. Kebijakan-kebijakan terutama dalam bidang pendidikan hendaknya dianggap masyarakat sebagai miliknya. Dengan adanya perasaan memiliki masyarakat akan semakin banyak sumbangannya dalam implementasi pendidikan.

Sementara itu, peningkatan mutu melalui persaingan antar sekolah juga tidak dapat diremehkan dampaknya. Pemerintah daerah harus selalu menciptakan iklim persaingan yang *fair* dan bila perlu diberikan *reward* kepada sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan pedoman pemerintah daerah. Perlu diingat bahwa hakikat manusia paling suka bersaing. Asal persaingan di *manage* dengan tepat, maka sangat memungkinkan akan membawa hasil yang positif bagi peningkatan mutu pendidikan dasar (SD).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk keberhasilan desentralisasi pendidikan tentunya harus mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak. Bagaimanapun berbagai reformasi seperti otonomi daerah, reformasi penyelengaraan pendidikan dalam kerangka otonomi daerah, termasuk implementasi manajemen berbasis sekolah memerlukan dukungan konsensus dan komitmen bersama dari seluruh *stakeholders* pendidikan yang terkait. Komitmen inilah terlebih dahulu dibangun secara bersama sehingga peningkatan mutu pendidikan (baca: mutu sekolah dasar) dalam era otonomi daerah benar-benar merupakan sebuah keniscayaan yang dapat dicapai.

KESIMPULAN

Peningkatan mutu Sekolah Dasar di era Otonomi Daerah membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah daerah, masyarakat, pihak sekolah, dan seluruh *stakeholders* pendidikan yang terkait. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk

menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Dengan adanya desentralisasi dalam sistem kependidikan di Indonesia pemerintah haruslah memperluas inovasi Manajemen Berbasis Sekolah ke seluruh pelosok daerah agar adanya keadilan anak bangsa dalam mengenyam pendidikan. Kata kunci dari penguatan sistem otonomi daerah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar adalah harus adanya kemauan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk memaksimalkan seluruh potensi daerah yang ada untuk digunakan seefektif mungkin dalam mengelola pendidikan. Penguatan sistem otonomi daerah dalam bentuk implementasi Manajemen Berbasis Sekolah diharapkan dapat meningkatkan mutu Sekolah Dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Bafadal, Ibrahim. (2003). *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar.* Jakarta : Bumi Aksara.

Beare, H and W. Lowe Boyd. (1993). *Restructuring School.* London : The Falmers Press.

Fattah, Nanang. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.

Imron, Ali. (2008). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia (Proses, Produk, dan Masa Depannya).* Jakarta : Bumi Aksara.

Mulyasa, E. (2006). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru.* Bandung : Remaja Rosdakarya.

Rivai dan Murni.(2010). *Education Management Analisis Teori dan Praktik.* Jakarta: Rajawali Pers.

Said, M. (2005). *Arah Baru Otonomi Daerah.* Malang : UMM Press.

Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan (Konsep Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Sekolah Efektif).* Jakarta : Rineka Cipta

Tilaar, H.A.R. (2004). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional.* Jakarta : Rineka Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*